

# Calon Siap Tangkis Serangan Seputar Isu HAM

KORAN TEMPO - 14 Jan '19 (1)

Presiden harus berani mengambil keputusan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

**JAKARTA** - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan pasangan inkumben berfokus pada pemaparan visi-misi tentang penuntasan kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu dalam debat perdana pada Kamis nanti. Arsul mengatakan pembahasan kasus HAM masa lalu merupakan penegasan bahwa ada pekerjaan pemerintah yang belum tuntas. "Ini utang pemerintahan Jokowi," kata Arsul, kemarin.

Komis Pemilihan Umum telah menetapkan empat tema besar yang akan menjadi materi debat perdana: HAM, hukum, antikorupsi, dan terorisme. Kedua pasangan calon bersama tim pemenangan telah menyiapkan materi debat ini. Sejumlah pengamat dan aktivis menilai setiap pasangan calon memiliki beban dalam tema pada debat pertama tersebut.

Arsul mengatakan visi dan misi Jokowi-Ma'ruf dalam isu HAM memiliki sembilan fokus utama. Salah satunya, mereka berjanji melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pasangan ini juga berjanji meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM. "Ini adalah untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM," kata dia.

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diprediksi harus berhadapan dengan isu yang terus menghantam Prabowo dalam setiap debat pemilihan presiden. Prabowo terus dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM, yaitu penculikan dan penghilangan orang yang terjadi pada era reformasi. Adapun Jokowi akan disorot pada isu penuntasan kasus HAM berat masa lalu, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Sebagai persiapan debat, sejumlah nama besar tergabung sebagai mentor Jokowi-Ma'ruf. Mereka adalah mantan Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,



Pasangan capres dan cawapres dalam deklarasi pemilu damai yang diadakan Komisi Pemilihan Umum di Monas, Jakarta Pusat, September lalu.

Mahfud Md; dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Edward Omar Sharif Hiarije.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso,

mengatakan calonnya sudah menyiapkan sejumlah jawaban atas kemungkinan pertanyaan dari Jokowi-Ma'ruf. Dia juga mengklaim, Prabowo pun telah siap menjawab semua pertanyaan panelis, termasuk tentang kasus

dugaan pelanggaran HAM masa lalu. "Kami akan menikmati saja pertanyaan ke kami," kata dia.

Badan Pemenangan telah membentuk tim delapan yang bertugas menyiapkan debat yang dipimpin Priyo.

Ia mengatakan tim ini di

antaranya mengurus isi debat yang dipimpin oleh Direktur Materi dan Debat Sudirman Said, dan persiapan relawan yang dipimpin Direktur Relawan Ferry Mursyidan Baldan.

Priyo juga mengatakan sejumlah pakar dan

tokoh politik memberikan masukan kepada Prabowo-Sandi. Priyo menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, juga memberi masukan kepada Prabowo-Sandi. "Itu semakin memperkuat bahwa tim kami siap," kata Priyo.

Adapun ahli yang diminta memberi masukan di antaranya mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, dan mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Laode M. Kamaluddin. Prabowo-Sandi juga berdiskusi dengan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Siane Indriani dan Ansori Sinungan.

Anggota Komnas HAM, Amiruddin, menyatakan debat calon presiden dan wakil presiden tak boleh dibiarkan mengambang. Menurut dia, presiden harus memiliki visi dan misi dalam penegakan HAM. Presiden, kata dia, harus merupakan sosok yang berani mengambil keputusan terhadap kasus pelanggaran HAM. "Jadi, tak boleh bilang itu salah (presiden) yang sebelumnya. Siapa pun yang menang harus ambil tanggung jawab dalam penuntasan kasus hukum dan HAM," kata dia. ●

## Menantang Komitmen Calon Presiden

**PEMENANG** pada pemilihan presiden tahun ini harus mengambil tanggung jawab sejumlah persoalan hak asasi manusia (HAM). Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditantang komitmennya untuk menuntaskannya.

**1. Kasus HAM di Aceh**  
Pemerintah dinilai masih berat-berat pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kasus HAM di Aceh sejak 2006. Meski sempat mengalami kendala setelah pengguguran Undang-Undang KKR Aceh oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah pusat sebenarnya bisa melaksanakannya berdasarkan UU Pemerintah Daerah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013.

**2. Kasus HAM di Papua**

Pemerintah juga belum menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Papua. Dalam tiga aturan tersebut, pemerintah seharusnya membentuk Komisi Kebenaran dan Pengadilan HAM untuk menuntaskan kasus-kasus di Papua.

**3. Konflik Agraria**  
Komisi Nasional HAM menca-

kat banyak konflik agraria yang belum tuntas. Kasus-kasus ini berpotensi menjadi polemik serius karena bersinggungan dengan kehidupan masyarakat.

**4. Kasus HAM Masa Lalu**  
Kejaksanaan Agung mengembalikan sembilan dari 10 berkas kasus HAM masa lalu kepada Komnas HAM. Korps Adhyaksa mengklaim berkas kasus Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Talang Sari 1998, Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I dan II 1998, Peristiwa Wasior 2000, Peristiwa Wamena 2002, Peristiwa HAM Aceh 1999, dan Penghilangan Orang 1997-1998 masih membutuhkan tambahan petunjuk.

**5. Konflik Identitas**  
Komnas HAM mencatat adanya konflik identitas yang mulai menyebar di masyarakat. Pemerintah harus segera meredakan konflik ini.

**6. Pencegahan dan Penanganan Terorisme**  
Komnas HAM mencermati pencegahan dan penanganan kasus terorisme. Sebagai pencegahan, pemerintah harus serius membatasi penyebaran ideologi ekstrem. Sebagai penindakan, pemerintah juga harus tetap menjunjung HAM.

**7. Penanganan Kasus yang Adil**  
Aktivis antikorupsi mencatat sejumlah ketimpangan proses hukum yang dilakukan penegak hukum. Kasus-

kasus bernuansa politik, seperti penghinaan presiden dan kriminalisasi, prosesnya lebih cepat. Adapun kasus-kasus lain, seperti penyerangan aktivis dan kasus HAM, justru lambat atau bahkan mangkrak.

**8. Penghapusan Hukuman Mati**  
Aktivis HAM meminta pemerintah menghapus hukuman mati dalam semua kasus pidana. Menurut mereka, penghapusan hukuman mati dapat menjadi pintu reformasi hukum dengan membuka ruang pada evaluasi terhadap kemungkinan proses hukum yang tak adil.

FRANCISCO ROSARIANS | SUMBER: KOMNAS HAM DAN PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM INDONESIA